



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 188 / 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, yang menyebutkan bahwa tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan adalah koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa sesuai Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 4 / BAPEMPERDA / X / 2019, tanggal 31 Oktober 2019, telah disetujui secara aklamasi oleh 44 (empat puluh empat) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2019;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 sebanyak 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagai prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dan dibentuk menjadi Peraturan Daerah antara Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 4 / BAPEMPERDA / X / 2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIDA).
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Mikro (Usulan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren (Usulan Raperda Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

KEDUA : Target waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 sebagaimana DIKTUM KESATU selengkapnya sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 namun tidak dapat diselesaikan pembahasannya, langsung dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020.

KELIMA : Hal-hal lain yang berkenaan teknis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini akan dibicarakan bersama-sama secara musyawarah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 8 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait)
8. Direkur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR : 188 / 36 TAHUN 2019
 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2019

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIDA)	Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah.	√		1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035.	Disperindag Kabupaten Grobogan	Maret 2020	
2	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2012	Perubahan Kriteria Pengenaan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.		√	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	BPPKAD Kabupaten Grobogan	Mei 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	tentang Pajak Bumi dan Bangunan				2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.			
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyesuaian Perizinan Bidang Peternakan.		√	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan	Juni 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
					2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.			
4	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021	Penyertaan Modal.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Bagian Perekonomi-an SETDA Kabupaten Grobogan	Juli 2020	
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2019	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	√		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	BPPKAD Kabupaten Grobogan	April - Juni 2020	
6	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	Perubahan Anggaran Pendapatan dan		√	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	BPPKAD Kabupaten Grobogan	Juli - September 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Grobogan Tahun Anggaran 2020	Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.						
7	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan	Perusahaan Umum Daerah.	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Bagian Perekonomi-an SETDA Kabupaten Grobogan	Juli 2020	
8	Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Pedoman Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Grobogan.	√		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Disperindag Kabupaten Grobogan	Juli 2020	
9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan	Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.		√	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan	Dinas Lingkungan Hidup	Juli 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Nomor : P22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang	- Penghapusan Izin Prinsip; - IPPT - IMB		√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	September 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
					2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.			
11	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021.	√		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	BPPKAD Kabupaten Grobogan	Oktober – Desember 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Badan Kesbang dan Linmas	November 2020	
13	Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Mikro	Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Mikro.			<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 	Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan	Juni 2020	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	
14	Pondok Pesantren	Pondok Pesantren.			Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.	Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Grobogan	Juni 2020	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

